

Landasan Pengembangan Filsafat Pancasila

(Hasil rangkuman Internship Dosen-dosen Filsafat Pancasila,
tanggal 8 -18 September 1996
di Hotel Cakra Kembang, Yogyakarta)

T i m :

Dr. Damarjati Supadjar *Dr. Sri Soeprapto, MS.*
Dr. Ali Mudhofir *Dr. Noor MS. Bakry*

Filsafat Pancasila dikembangkan berdasarkan empat landasan filosofis, yakni ontologis, epistemologis, aksiologis, dan antropologis. Landasan ontologis dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis-jenis keberadaan yang diterapkan pada Pancasila. Landasan epistemologis dimaksudkan untuk mengungkapkan sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi. Landasan aksiologis dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis-jenis nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Landasan antropologis dimaksudkan untuk mengungkapkan hakikat manusia dalam rangka pengembangan sistem filsafat Pancasila

I. LANDASAN ONTOLOGIS PANCASILA

A. Pengertian Ontologi

Istilah "ontologi" berasal dari kata Yunani *onta* yang berarti "sesuatu yang sungguh-sungguh ada", "kenyataan yang

sesungguhnya, dan *logos* yang berarti "studi tentang", "teori yang membicarakan".

Ontologi mempelajari ciri hakiki (pokok) dari keberadaan (*Being*) yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Ontologi mempelajari keberadaan dalam bentuknya yang paling

abstrak, dan pertanyaan yang diajukan adalah "Apakah keber-adaan (Ada) itu? Apakah hakikat keberadaan sebagai keberadaan (*Being-as-Being*)".

Ontologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tatanan (keteraturan) dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Kategori-kategori yang dipakai adalah: meng-ada atau menjadi, aktualitas atau potensionalitas, nyata atau nampak, perubahan, eksistensi atau non-eksistensi, hakikat, kemutlakan, yang terdalam.

Ontologi dipakai searti dengan metafisika atau dianggap sebagai cabang dari metafisika kalau tinjauannya dikaitkan dengan cabang filsafat yang lain misalnya epis-temologi, etika, estetika.

B. Masalah Filsafat

Masalah filsafat dapat dibedakan menjadi tiga jenis.

a. Masalah tentang ada, yang ada, keberadaan (*being*) / eksistensi (*existence*). Masalah keberadaan/eksistensi dibahas dalam cabang filsafat metafisika. Masalah metafisika dibedakan menjadi tiga yaitu masalah ontologi (ada-umum), kosmologi (ada-dunia) dan antropologi (ada-manusia).

b. Masalah tentang pengetahuan (*knowledge*) kebenaran (*truth*). Masalah tentang pengetahuan / kebenaran ditinjau dari segi isinya dibahas dalam cabang filsafat epistemologi. Masalah pengetahuan/kebenaran ditinjau dari segi bentuknya dibahas dalam cabang filsafat logika.

c. Masalah tentang nilai-nilai (*values*). Masalah tentang nilai-nilai dibahas dalam cabang filsafat aksiologi. Aksiologi merupakan *modern term for theory of value (the desired, preferred, good), investigation of its nature, criteria, and metaphysical status* (Runes, 1975). Nilai-nilai dibedakan menjadi dua. Nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keindahan. Nilai-nilai kebaikan dibahas dalam cabang filsafat etika. Nilai-nilai keindahan dibahas dalam cabang filsafat estetika.

C. Masalah Metafisik

Masalah metafisik dibagi tiga yaitu problem ontologis, problem kosmologis dan problem antropologis.

1. Beberapa masalah ontologis antara lain:
 - (a) Apa yang dimaksud dengan ada, keberadaan atau existensi dan bagaimanakah penggolongan cara beradanya?
 - (b) Bagaimanakah kuantitas (jumlah) dan susunan dari keberadaan atau eksistensi?
 - (c) Bagaimanakah kuantitas (jumlah) dan susunan dari keberadaan atau eksistensi?
 - (d) Kualitas dari keberadaan itu tetap atau berubah
 - (e) Apa saja kualitas (sifat) dari keberadaan?
 - (f) Bagaimanakah proses dari keberadaan?
2. Masalah kosmologis antara lain:
 - (a) Jenis keteraturan apa yang ada dalam alam?
 - (b) Apa hakikat hubungan sebab dan akibat?
 - (c) Apakah ruang itu dan apakah ruang tidak terbatas?
 - (d) Apakah waktu itu dan apakah waktu mempunyai permulaan?
3. Masalah antropologi antara lain:
 - (a) Bagaimanakah susunan hakikat manusia itu?
 - (b) Bagaimana terjadi hubungan badan dan jiwa?
 - (c) Apa yang dimaksud dengan kesadaran?
 - (d) Manusia sebagai makhluk bebas atautakah tak bebas?

D. Beberapa pandangan tentang Keberadaan (Pandangan Ontologis)

1. Beberapa pandangan yang menyangkut keberadaan dipandang dari segi jumlah atau kuantitas.

- (a) Monisme: berpandangan bahwa hanya ada satu keberadaan yang fundamental. Keberadaan tersebut dapat berupa jiwa, roh, materi, Tuhan atau substansi lainnya.
- (b) Dualisme: berpandangan bahwa ada dua keberadaan (substansi) yang masing-masing berdiri sendiri.
- (c) Pluralisme: berpandangan bahwa ada keberadaan yang banyak (lebih dari dua). Pandangan filsafat kontemporer diwakili oleh postmodernism.

2. Beberapa pandangan yang menyangkut keberadaan dipandang dari segi sifat atau kualitas.

- (a) **Spiritualisme:** berpandangan bahwa keberadaan atau kenyataan yang terdalem adalah roh, idea, cita, yaitu sesuatu yang bukan materi.
- (b) **Materialisme:** berpandangan bahwa yang merupakan keberadaan adalah materi, yaitu sesuatu yang menempati ruang.

3. Beberapa pandangan yang menyangkut keberadaan dipandang dari segi proses, kejadian atau perubahan.

- (a) **Mekanisme:** berpandangan bahwa semua gejala dari keberadaan dapat dijelaskan berdasar asas-asas mekanik. Semua gejala adalah hasil dari materi yang bergerak dan berproses menurut kaidah sebab-akibat.
- (b) **Teleologi:** berpandangan bahwa yang berlaku dalam gejala alam bukanlah semata-mata kaidah sebab akibat, akan tetapi sejak semula memang ada sesuatu kemauan atau kekuatan yang mengarahkan alam ke suatu tujuan.

E. Pandangan Ontologi Pancasila

1. Tuhan adalah sebab pertama (*causa prima*) dari segala sesuatu, Yang Esa dan segala sesuatu tergantung kepadanya. Tuhan adalah sempurna dan maha kuasa, merupakan dzat yang mutlak, ada secara mutlak. Zat yang mulia dan sempurna. *Causa finalis*.

2. Manusia memiliki susunan hakikat pribadi yang monopluralis (majemuk tunggal), bertubuh-berjiwa, berakal-beraspekberkehendak, bersifat individu-makhluk sosial, berkedudukan sebagai pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan yang menimbulkan kebutuhan kejiwaan dan religius, yang seharusnya secara bersama-sama dipelihara dengan baik dalam kesatuan yang seimbang, harmonis dan dinamis.

3. Mengakui adanya kualitas metafisis "satu" (*trancendental one*). "satu" ialah secara mutlak tidak dapat terbagi. Merupakan diri pribadi yaitu mempunyai bentuk, susunan, sifat-sifat dan keadaan tersendiri sehingga kesemuanya itu menjadikan yang bersangkutan suatu keu-

tuhan (keseluruhan) yang mempunyai tempat tersendiri (utuh, terpisah dari yang lain, mempunyai bentuk dan wujud).

4. Mengakui adanya "rakyat". Rakyat ialah keseluruhan jumlah semua orang, warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu, yang dalam segala sesuatunya meliputi semua warga, dan untuk keperluan seluruh warga, termasuk hak dan kewajiban asasi kemanusiaan setiap warga, sebagai perseorangan dan sebagai penjelmaan hakikat manusia. Hakikat rakyat adalah pilar negara dan yang berdaulat.

5. Mengakui adanya kualitas metafisis "baik" (*trancendental good*) yang berupa adil. Adil ialah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang merupakan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Sebagai penjelmaan hakikat manusia (wajib lebih diutamakan daripada hak), pemenuhan hak sebagai kewajiban tersebut mencakup hubungan antara negara (pendukung wajib) dengan warga negaranya (disebut keadilan distributif), hubungan antara warga negara (pendukung wajib) dengan negara (disebut keadilan legal) dan hubungan di antar sesama warga negara (disebut keadilan kumutatif). Keadilan mengandung inti adil yang pada hakikatnya adalah kerelaan (aspek jiwa) dan kesebandingan (aspek raga).

Untuk memperjelas arti ontologis sila-sila Pancasila, perlu diberi contoh-contoh implementasinya melalui pemahaman epistemologis, aksiologis yang direfleksikan kedalam kehidupan antropologis.

II. LANDASAN EPISTEMOLOGIS PANCASILA

A. Pengertian Epistemologi

Epistemologi berasal dari kata Yunani, "*episteme*" dan "*logos*". Episteme biasa diartikan sebagai "pengetahuan" atau "kebenaran" dan "*logos*" diartikan "pikiran" atau teori. Epistemologi dapat diartikan sebagai "teori pengetahuan yang benar" dan lazimnya hanya disebut "teori pengetahuan" yang dalam bahasa Inggrisnya "*Theory of knowledge*".

Istilah-istilah lain yang setara maknanya dengan "epistemologi" dalam

pelbagai perpustakaan filsafat kadang-kadang disebut juga "*material logic*" logika material", *teorilogi*, dan dalam bahasa Indonesia lazim diistilahkan "filsafat pengetahuan". Atau kadang-kadang disebut juga "Teori Pengetahuan" dengan maksud untuk membedakannya dari epistemologi yang khusus membahas masalah keilmuan" yang dalam bahasa Inggrisnya "*Philosophy of Science atau Theory of Science*".

Mengenai batasan pengertian epistemologi dapat dikemukakan sebagai berikut: epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki secara kritis hakekat, landasan, batas-batas dan patokan kesahihan pengetahuan, karena memeriksa bagaimana kita mengetahui, dapat pula ia dipandang sebagai teori kognisi. Ia lebih mendasar dari metodologi. Karena itu asumsi-asumsi epistemologi suatu bentuk pengetahuan tercermin (pada metodologi yang diterapkan dalam pengembangan pengetahuan tersebut. Landasan epistemologi menentukan cara-cara yang dipakai untuk memperoleh dan memvalidasi pengetahuan.

B. Pengertian Pengetahuan

Dalam kepustakaan Indonesia pengertian pengetahuan adalah merupakan hasil dari proses. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa pengetahuan adalah hasil aktivitas kejiwaan karena ada hubungan antara subjek yang dasar dengan objek yang ingin dikenal atau dengan kata lain hasil aktivitas kesadaran karena adanya hubungan antara subjek dan objek yang ingin dikenal.

C. Terjadinya Pengetahuan

Terjadinya pengetahuan sebagai suatu proses suatu proses dan aktivitas kejiwaan ditandai dengan beberapa tindakan antara lain:

Pertama: Pengetahuan adalah hasil suatu perbuatan tertentu yang bertitik tumpu pada kegiatan batin kita sendiri.

Kedua: Pengetahuan adalah hasil suatu perbuatan yang sadar ialah suatu perbuatan yang tidak terjadi tanpa kita mengenal sesuatu mengenyainya.

Ketiga: Pengetahuan merupakan hasil dari suatu kegiatan yang dasar yang diarahkan kepada suatu isi sehingga kita niscaya mengenal sesuatu.

Keempat: Pengetahuan adalah hasil perbuatan dasar untuk mengenal yang diarahkan pada suatu isi maupun kenyataan.

Kelima: Pengetahuan adalah hasil perbuatan sadar untuk mengenal yang diarahkan kepada suatu isi maupun kenyataan yang bersifat pasif.

D. Sumber Pengetahuan

Pada dasarnya persoalan sumber pengetahuan tidak dapat dipisahkan dengan masalah terjadinya pengetahuan. Dalam buku yang berjudul "*An Introduction to Philosophical Analysis*". Jhon Hospers mengemukakan bahwa alat-alat yang menyebabkan terjadinya dan sebagai sumber pengetahuan adalah indra, nalar, otoritas, intuisi, wahyu, dan keyakinan.

E. Aliran-aliran dalam Epistemologi.

Epistemologi sebagai cabang sistematika filsafat mempunyai beberapa aliran yang cukup beragam yang masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri, aliran tersebut antar lain Empirisme, Rasionalisme, Logika Positivisme, dan Intuisisme.

F. Dasar-dasar Kefilsafatan Pancasila Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pancasila sebagai sistem filsafat adalah berlandaskan pada hakekat kodrat manusia, walaupun semula tidak terpikirkan oleh tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia tentang hakekat kodrat manusia, namun karena betul-betul perenungannya yang mendalam maka secara langsung dijiwai oleh hakekat kodrat manusia dalam hidup bersama. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai ciri-ciri antara lain: a. Koherensi, b. Inklusif, c. Mendasar, d. Spekulatif, e. Sintesis, f. Komprehensif, g. Sistematis

G. Penalaran Filsafat

Penalaran filsafati merupakan bagian dari pemikirannya pada umumnya yang khusus berhubungan dengan penyimpulan. Penalaran filsafati haruslah bersifat koherensi dalam arti runtut dan tidak ada pertentangan di dalamnya sehingga hasil dari pemikiran ini yang disebut dengan filsafat, juga harus bersifat koheren dan harus mengikuti prinsip-prinsip pemikiran sebagai berikut:

- a. Rasional
- b. Analisis
- c. Dealektika
- d. Analitika Sintetik
- e. Analisis Abstraksi

H. Ideologi dan Filsafat Pancasila

Ideologi adalah perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai di dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur ideologi antara lain:

- a. Keyakinan
- b. Mitos
- c. Loyalitas

Pancasila sebagai ideologi negara secara spekulatif dirumuskan oleh tokoh-tokoh kenegaraan bangsa Indonesia pada tahun 1945 dalam sidang-sidang BPUPKI dan dilanjutkan dalam sidang-sidang PPKI yang menjadikannya sebagai dasar negara Indonesia.

I. Epistemologi Pancasila

1. Pengetahuan Empirik Pancasila

Pancasila merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia pada saat kelahirannya yang digali dari budaya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri atas pelbagai suku sejak dahulu sampai sekarang selalu menyeimbangkan semua unsur kodrat manusia yang dalam perwujudannya adalah berketuhanan berkemanusiaan berpersatuan berkekeluargaan dan berkeadilan, yang kemudian menjadi dasar rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berkekeluargaan dalam kenegaraan disebut dengan berkerakyatan.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam adat budayanya, secara kodrati mengamalkan kelima unsur Pancasila tersebut, sehingga dapat dinyatakan ber-Pancasila dalam adat budaya. Dalam kehidupan beragama pun mengamalkan juga kelima unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, antar umat beragama antara satu dengan yang lainnya ada rasa persatuan sebagai sesama warga masyarakat dan saling hormat menghormati dalam hal beragama, sehingga dinyatakan ber-Pancasila dalam bidang religius. Setelah bernegara kelima unsur Pancasila tersebut menjadi dasar negara dengan rumusan yang bersifat kolektif, sehingga asas-asas kenegaraan Indonesia berpangkal pada Pancasila. Dengan adanya ketiga hal tersebut menurut Notonagoro dapat distilahkan bahwa bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam Tri-Prakara, yaitu: ber-Pancasila dalam adat budaya atau dalam kebudayaan, ber-Pancasila dalam keagamaan atau dalam bidang religius, dan ber-Pancasila dalam kenegaraan.

2. Pengetahuan Rasionalis Pancasila

Pancasila merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia untuk mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Inti kehidupan bangsa Indonesia yang juga sebagai inti kehidupan manusia pada umumnya merupakan sifat hakikat manusia, yaitu berketuhanan berkemanusiaan berpersatuan berkekeluargaan dan berkeadilan. Kelima hal tersebut merupakan sebagai sifat dan juga sebagai hakikat manusia, karena jika tidak ada lima hal tersebut bukanlah manusia. Hal ini direnungkan dan dinalar oleh bangsa Indonesia sebagai dasar hidup bersama dalam bernegara.

Dengan dasar perenungan dan pertimbangan akal, lima inti kehidupan manusia tersebut dengan tambahan ciri khas bangsa Indonesia menjadi sifat kolektif, dasar hidup bangsa Indonesia

dalam mencapai kehidupan yang dicita-citakan, sehingga Pancasila menjadi aksioma kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara, yang pelaksanaannya dalam kenegaraan dipancarkan ke empat pokok pikiran. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan adalah bersifat organis dan bentuk susunannya hirarkis piramidal serta sila-silanya saling mengkualifikasi merupakan refleksi filsafati, hasil pertimbangan akal untuk menjadi dasar tindakan. Pancasila bersifat organis berfungsi dalam hal sebagai ideologi negara, susunan hirarkis piramidal berfungsi dalam hal pengamalan Pancasila, sila-silanya saling mengkualifikasi berfungsi dalam hal landasan politik negara.

3. Teori-teori Kebenaran

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat praktis yang juga sebagai ideologi negara dan juga sebagai dasar negara, telah memenuhi tiga teori kebenaran yang dikemukakan filsafat, sehingga Pancasila merupakan suatu ideologi dan dasar negara yang tangguh, yang mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk mengatasi segala tantangan ancaman hambatan dan gangguan.

(1) Teori Koherensi

Teori koherensi yang diterapkan dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dapat dinyatakan bahwa suatu pernyataan atau penjabaran dalam ideologi diakui benar bila pernyataan atau penjabaran itu bersifat konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.

Pancasila sebagai ideologi negara, pernyataan - pernyataan yang merupakan penjabarannya juga konsisten tidak ada kontradiksi dengan nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Hal ini telah terbukti juga hubungan antar bagian atau antar sila dalam Pancasila, maupun Pancasila sebagai aksioma kehidupan dalam sistem kenegaraan dipancarkan ke empat pokok pikiran yang

selanjutnya dijemakan dalam pasal-pasal UUD 1945, juga konsisten. Jadi Pancasila semacam aksioma kehidupan diturunkan ke empat pokok pikiran sebagai teorema-teorema dan selanjutnya diturunkan ke pasal-pasal UUD 1945 sebagai kaidah-kaidah atau hukum-hukum, yang kemudian dijabarkan dalam rancangan pembangunan nasional. Dalam penjabaran ini telah terbukti bahwa pasal-pasal UUD 1945 yang dijabarkan dalam rancangan pembangunan nasional adalah konsisten dengan empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, dan empat pokok pikiran adalah konsisten dengan Pancasila sebagai aksioma kehidupan bernegara.

(2) Teori Korespondensi

Teori korespondensi yang diterapkan dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dapat dinyatakan bahwa suatu pernyataan dalam ideologi diakui benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut.

Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan kenyataan sehari-hari bangsa Indonesia, dan kenyataannya telah terbukti baik berdasarkan penerangan maupun penelitian untuk mendukung kebenarannya.

Pancasila sebagai ideologi negara dengan maksud dan tujuan segala yang berhubungan dengan hidup bernegara harus dilandasi dalam hal titik tolak pelaksanaannya, dibatasi dalam gerak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam mencapai tujuannya dengan Pancasila. Pernyataan ini telah terbukti dengan dijemakannya Pancasila dalam hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis, sehingga Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

(3) *Teori Pragmatis*

Teori pragmatis yang diterapkan dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dapat dinyatakan bahwa suatu pernyataan dalam ideologi diakui benar jika konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.

Dalam ajaran Pancasila dikemukakan bahwa "Pancasila adalah pemer-satu bangsa Indonesia". Ajaran ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini memang dapat digunakan secara praktis, dan fakta sejarah telah membuktikan baik sejak proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara maupun dalam menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi, dengan jiwa Pancasila untuk mempersatukan bangsa, semua dapat teratasi dan semua mempunyai semangat persatuan demi kesatuan bangsa Indonesia.

Semangat persatuan yang terkandung dalam ajaran Pancasila dapat digunakan juga untuk membina kerukunan umat beragama dengan asas yang paling mendasar yaitu "tenggang rasa". Tenggang rasa atau disebut juga dengan istilah tepa-selira merupakan dasar yang paling utama dalam hubungan antar umat beragama, dan sekaligus juga menjadi landasan toleransi umat beragama, tanpa adanya tenggang rasa sulit terwujud adanya toleransi umat beragama. Dengan dasar uraian tersebut maka konsep tenggang rasa merupakan hal yang bersifat praktis sebagai dasar kerukunan umat beragama. Di samping itu tenggang rasa juga menjadi landasan konsep hak-hak asasi manusia. Diakui atau tidak memang demikian kenyataannya, yang telah terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

J. P e n u t u p

Epistemologi Pancasila merupakan Epistemologi yang khas Indonesia merupakan jalinan secara serasi dari theory-theory Epistemologi rasionalis, empiris dan

pragmatis yang didasari oleh tata nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Berdasarkan kekhasan Epistemologi Pancasila tersebut di atas maka diusulkan suatu nama dari Epistemologi dimaksud, yaitu Epistemologi yang komprehensif Integral (menyeluruh terpadu).

III . LANDASAN AKSIOLOGIS PANCASILA

A. P e n d a h u l u a n

1. Latar Belakang Masalah

Pancasila dijadikan rujukan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pancasila harus mampu mengantisipasi permasalahan yang dihadapi yang timbul dalam segala jaman (Soeprpto, 1995:11). Permasalahan yang timbul menjadi lebih kompleks sebagai akibat pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi dan kemajuan jaman membawa konsekuensi, bahwa Pancasila perlu memiliki kejelasan dan ketegasan dalam hal landasan nilai, wawasan dan visinya, namun tetap menjamin keterbukaan dan tanggap terhadap perkembangan dan pembaruan.

Kebijaksanaan atau jawaban terhadap permasalahan yang kompleks dan terus berkembang akan mengacu pada pola pikir atau faham tertentu. Pola pikir atau faham tersebut dapat bersumber dari pendapat pribadi seseorang atau dapat juga bersumber dari pola pikir atau faham yang berkembang dalam masyarakat (Soeprpto, 1995: 13). Perbedaan pendapat atau kebijaksanaan dapat timbul untuk menyelesaikan suatu permasalahan, karena perbedaan pola pikir atau faham dari anggota masyarakat.

Perbedaan pendapat atau kebijaksanaan yang terjadi di antara anggota-anggota masyarakat memang tidak dapat dihindarkan, namun yang perlu dihindarkan adalah jangan sampai perbedaan tersebut menimbulkan pertentangan dan perpecahan masyarakat. Perbedaan-perbedaan tersebut perlu diusahakan ke arah sintesis dalam arti saling memperkaya dan saling melengkapi. Pandangan ke arah sintesis

lebih mengutamakan persatuan dalam arti perbedaan-perbedaan yang saling mempunyai daya tarik diupayakan ke arah kerja sama, sedangkan yang tidak menimbulkan daya tarik dapat saling diketemukan dalam suatu perpaduan jalan tengah atau suatu sintesis yang memperkaya masyarakat (Notonagoro, 1986: 16). Perbedaan-perbedaan akan dapat diupayakan ke arah sintesis apabila perbedaan-perbedaan tersebut tidak timbul akibat perbedaan pola pikir. Suatu pola pikir secara konsisten akan menentukan pola pendapat, pola tindakan, dan perbuatan. Agar perbedaan-perbedaan pendapat dan perbuatan konkrit anggota-anggota masyarakat dapat dibawa ke arah sintesis, maka diperlukan kejelasan pola pikir yang sama. Landasan aksiologi adalah nilai-nilai yang mendasari pembentukan pola pikir tersebut.

Pancasila mempunyai sifat terbuka, tidak eksklusif. Pancasila sebagai ideologi membuka diri terhadap masuknya inspirasi dan aspirasi anggota-anggota masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka akan semakin mampu dan tanggap menghadapi tantangan jaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga tidak menganggap salah berbagai ideologi yang bersumber dari budaya bangsa lain (Sudharmono, 1955: 6).

2. Permasalahan

Permasalahan pokok dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana landasan Aksiologi Pancasila itu? Untuk menjawab permasalahan tersebut diuraikan dalam pembahasan dalam bab berikut.

B. Uraian Pembahasan

1. Landasan Sifat Dasar Nilai Pancasila

Sebagaimana diketahui bahwa sifat-sifat Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bersifat organis. Ditinjau dari sifat dasar nilai Pancasila itu mengandung kebenaran tetapi sifat berjenjang, yang urutannya sebagai berikut:

- (1) Nilai Religiusitas
- (2) Nilai Eudaemistik
- (3) Nilai Utilitaristik
- (4) Nilai Hedonistik
- (5) Nilai Pragmatik

2. Landasan ragam Nilai Pancasila

Pancasila sebagai sistem nilai tergolong nilai kerokhanian. adapun didalam nilai kerokhanian itu sudah terkandung adanya nilai religius yang bersumber kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai kebenaran yang bersumber kepada akal manusia, nilai moral yang bersumber kepada hati nurani manusia, nilai keindahan yang bersumber pada rasa.

3. Landasan Kriteria Nilai Pancasila

Sesuai dengan teori Hylomorfisme (aristoteles-teori causalitas) bahwa apa yang dikemukakan oleh para pengusul dasar Indonesia merdeka agar Pancasila dijadikan dasar filsafat Negara Indonesia Merdeka telah memenuhi syarat sebagai causa materialis karena merupakan hasil penggalian yang berupa bahan atau usulan yang disampaikan kepada sidang BPUPKI. Ternyata semua usulan dalam sidang BPUPKI tersebut dimak-sudkan agar dijadikan dasar filsafat negara Indonesia merdeka.

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI yaitu menyusun dan merumuskan serta menetapkan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka sesuai dengan causa efisien. Hasilnya berupa bentuk susunan dan rumusan Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, hal ini sesuai dengan causa formalis.

Sesuai dengan kebenaran teori causalitas Aristoteles, Pancasila memenuhi kriteria nilai instrinsik, di samping juga mengandung nilai instrumental yang menunjukkan kemampuan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Landasan Kedudukan Nilai Pancasila

Jiwa Pancasila dan nilai Pancasila diyakini adanya oleh bangsa Indonesia. Kedua-duanya terdapat dalam sosio budaya bangsa berupa tata nilai bangsa yang mengutamakan asas keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, musya-

warah, gotong royong, dan sebagainya yang sekaligus merupakan identitas bangsa dan kepribadian bangsa (*hal tersebut menunjukkan kedudukan nilai objektifnya Pancasila*).

Di dalam rangka memasuki era globalisasi (*komunikasi dan informasi*) sebenarnya Pancasila juga memiliki kedudukan nilai objektifitas, karena kedudukannya sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka yang dapat menerima interaksi-interaksi budaya dari luar, dimana budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Meskipun demikian kita juga memperhatikan batas-batas keterbukaan Pancasila dengan tetap melarang ideologi komunisme dan mencegah berkembangnya faham liberalisme.

C. Penutup

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa landasan aksiologis Pancasila merujuk kepada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945.

Nilai-nilai dasar ini harus menjiwai, menghayati nilai instrumentalnya yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan berupa Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/ 1966, TAP MPR II/MPR/1978, TAP MPR II/MPR/1983, TAP MPR/II/1988, TAP MPR No.II/MPR/1993.

Aktualisasi nilai-nilai dasar tersebut kontekstual dan konsisten dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

IV. LANDASAN ANTROPOLOGIS PANCASILA

A. Pendahuluan

Permasalahan pertama yang muncul dalam pembahasan Filsafat Antropologi Pancasila (FAP) adalah di mana letak atau kedudukan Filsafat Antropologi Pancasila dalam sistem Filsafat Pancasila. Berdasar telaah kelompok D Antropologi Filsafat, disimpulkan bahwa FAP merupakan bagian dari Filsafat Pancasila.

Filsafat Antropologi Pancasila kerangka tersebut tidak lain merupakan pemahaman kemanusiaan yang didasarkan atas refleksi kritis untuk mendapatkan ke-

benaran filsafat. Dalam konteks ini, FAP diartikan sebagai sistem hakikat mengenai manusia yang selalu mendapatkan hikmah. Menurut Socrates sebagai Bapak Filsafat Antropologi manusia terdiri dari unsur-unsur tanah, air, api dan udara. Akan tetapi unsur-unsur itu baik secara sendiri maupun bersama tidak sama sekali mempunyai sifat manusia. Apa yang dikemukakan oleh Socrates tersebut sesungguhnya telah dikemukakan oleh Empedoblas, Tokoh pluralisme abad ke-lima S.M. Namun demikian yang dimaksud dengan manusia bukan sekedar penjumlahan dari unsur-unsur itu, tetapi lebih dari itu. Dalam kaitan ini, manusia harus dipandang sebagai monopluralis, bukan monis dan juga bukan pluralis dengan monopluralistiknya itu, manusia berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya, yang dalam hubungannya itu manusia harus memelihara keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

B. Pokok-pokok Permasalahan

Berdasar konsep manusia yang monopluralis tersebut dapat dipertanyakan secara lebih deskriptif tentang dimensi-dimensi kodrati manusia. Dimensi-dimensi tersebut menyangkut susunan kodrat, sifat-kodrat, dan kedudukan kodrat.

C. Pembahasan

Filsafat antropologis Pancasila juga memandang manusia sebagai monopluralis, yang dimensi-dimensinya dijabarkan sebagai berikut:

1. Susunan kodrat, manusia terdiri dari:
 - a. Jiwa yang terdiri atas: unsur akal, rasa, dan karsa.
 - b. Raga terdiri atas: unsur benda tidak-hidup, unsur hewan dan unsur tumbuhan.
2. Sifat kodrat manusia mencakup sifat manusia sebagai:
 - a. makhluk individu
 - b. makhluk sosialKesatuan sifat individu dan sosial tersebut dipandang sebagai monodualis.
3. Kedudukan kodrat manusia mencakup kedudukan manusia sebagai:
 - a. makhluk berdiri-sendiri
 - b. makhluk Tuhan

Kesatuan kedudukan manusia sebagai makhluk berdiri-sendiri dan makhluk Tuhan tersebut dipandang sebagai monodualis.

Dari susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat manusia tersebut, manusia dapat memelihara hubungannya dengan Tuhan, dengan diri-sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya secara serasi, selaras, dan seimbang. Hal yang demikian sesungguhnya tercermin dalam sila-sila Pancasila.

D. Aktualisasi Nilai Filsafat Antropologi Pancasila

Aktualisasi nilai filsafat antropologis Pancasila dalam pembangunan diformulasikan dalam konsep pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan manusia mempunyai konotasi pendewasaan. Pendewasaan meliputi tahapan Biopsikologi, sosiokultural dan mental spiritual. Pendewasaan mental spiritual merupakan proses yang harus terus menerus dilakukan dalam pembangunan, agar manusia Indonesia lebih memiliki pemahaman filsafati dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan diri-sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya, termasuk benda-benda. Penyikapan terhadap benda perlu dielaborasi secara lebih mendalam, mengingat dalam pembangunan ini manusia lebih banyak berhubungan dengan benda-benda.

E. Penutup

Secara historis harus diakui bahwa Pancasila lahir sebagai konsensus politik untuk menjadi sistem filsafat, diperlukan pemikiran kritis dan reflektif terhadap segala fenomena yang ada termasuk disini pandangannya terhadap hakikat manusia. Sumbangan fikiran dari berbagai pihak, lebih-lebih dari kalangan akademis sangat diperlukan.

DAFTAR ACUAN

- Ali Mudhofir, 1996 : *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta, Gama Pres.
- Bertens, K. 1983 : *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta, Kanisius.
- Noor Ms. Bakry, 1995 : *Orientasi Filsafat Pancasila*, Yogyakarta, Liberty.

Notonagoro, 1975 : *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta, Pancuran Tujuh.

-----, 1987: *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta, Pancuran Tujuh.

Soeprapto, 1995 : *P-4 sebagai Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara*. Jurnal Filsafat, Edisi 22, Yogyakarta, Fakultas Filsafat UGM.

Sri Soeprapto, 1996 : *Landasan Aksiologi Pancasila*. Makalah Internship Dosen-Dosen Filsafat Pancasila, Yogyakarta.

Sudaharmono, 1995 : *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka*. Jurnal Filsafat Edisi 22, Yogyakarta, Fakultas Filsafat UGM.

Sunoto, 1982 : *Mengenal Filsafat Pancasila, Etika Pancasila*, Yogyakarta, UII.

Tim Dosen Filsafat Ilmu, 1996 : *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta Liberty.

Supadjar, Damardjati, 1996 : *Filsafat Antropologis Pancasila*, makalah pada Internship Dosen-dosen Filsafat Pancasila Se Indonesia, Kerjasama Pusat Studi Pancasila UGM dengan Ditjen Dikti Depdikbud, Yogyakarta 8-18 September 1996.